

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan / kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan di laksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi masyarakat melalui (KUR) kredit usaha rakyat pada tanggal 5 November 2007, presiden meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari pemerintah melalui Bank pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin (Komite Kredit Usaha Rakyat).

Adapun pengertian kredit UU pokok perbankan NO. 10 tahun 1998, adalah peyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan ilmu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara BANK dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

Penyaluran kredit selalu terkait dengan dua hal, yaitu menerima risiko dan menghasilkan profit. Kredit harus dinilai sehingga dapat merefleksikan risiko nasabah dan dapat ditentukan biaya atasnya. BANK harus mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit yang melekat pada seluruh aset dan aktivitasnya dengan mereview aset dan aktivitas tersebut secara cermat dan hati-hati(Habib,2008:22).

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat di katakan masih tergolong rendah.hal ini di karenakan Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia perlu ditingkatkan.

Setia setiap tahun anggaran selalu di lontarkan oleh pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat. dalam merealisasikan tujuan pembangunan,maka segenap potensi alam harus di gali, dikembangkan, dan di manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusianya yang harus ditingkatkan dari segi pengetahuan serta keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal,dan pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi.

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana berbagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia.

Partisipasi masyarakat Indonesia merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam mencapai sasaran pelaksanaan program pembangunan perekonomian bukan semata-mata di dasarkan pada kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan perekonomian masyarakat.pemerintahpun mengeluarkan kembali yang kegunaannya yaitu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kecil yang memiliki usaha kecil dan menengah masyarakat (UKM).

Ada beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat,yaitu:

1. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan.
2. Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 maret 2007 tentang kebijakan percepatan Sektor Riil dan pemberdayaan KUR/UKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.
3. Antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan yang di tandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ pembiayaan bagi KUR/UKM.
5. Perjanjian kerja sama antara Bank pelaksana dengan lembaga penjaminan
6. Standar operasional dan Prosedur pelaksanaan KUR.
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian nomor KEP-07/M.EKON/01/2020 tentang penambahan Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat.
8. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang standar operasional dan prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Suryanto Nur Bagus(Kepala pengawasan BANK otoritas jasa keuangan OJK) PROVINSI NTT mengemukakan penyaluran KUR perbankan di PROVINSI NTT pada 2018 lalu mencapai RP 1,49 Triliun namun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar RP 1,64 Triliun, Rabu (24/04/2019).

KUR di PROVINSI NTT di salurkan melalui delapan lembaga perbankan diantaranya, BANK BRI,BANK BNI,BANK BCA, BANK BTN, BANK BUKOPIN, BANK NTT,dan BANK ARTA GRAHA. Lebih lanjut penyaluran KUR di NTT juga masi didominasi untuk sektor konsumsi rumah tangga dibandingkan sector produktif. Untuk itu pihaknya terus mendorong perbankan di daerah agar memaksimalkan KUR pada sektor produktif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Usaha kecil dan menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus. Para pelaku bisnisnya pun menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil dan menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UKM ini diharapakan akan mampu mengurangi angka pengangguran jika melihat fakta lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Berbagai jenis produk yang dihasilkan para pelaku bisnis UKM memiliki kualitas. Hal ini dikarenakan keinginan mereka untuk mampu bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku bisnis tersebut bertaraf UKM tetapi mereka mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas sebelum barang yang mereka hasilkan akan dipasarkan. Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian, mereka harus saling bersaing untuk mampu menjadi yang diminati pasar, belum lagi

harus bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UKM mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan kesadaran mereka terhadap konsumen dan calon konsumen yang lebih selektif sebelum melakukan keputusan pembelian.

Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai: (1) pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, (5) kontribusi terhadap neraca pembayaran. Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta dapat terus menumbuhkan wirausahawan baru yang lebih tanggu. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi UKM dan peluang untuk mengembangkan UKM tersebut dengan memperluas akses pasar, baik dalam maupun luar negeri seperti yang diketahui bahwa perkembangan UKM di Indonesia saat ini meghadapi situasi yang begitu sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didefinisikan pengertian UMKM dan kriterianya, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud.

dalam undang-undang ini, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

. Bank Rakyat Indonesia(BRI) Kecamatan Kobalima, merupakan salah satu lembaga keuangan yang terletak di Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka yang berjarak 10 KM dari kota betun ke kecamatan kobalima merupakan salah satu organisasi yang berperan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengembangkan UKM di daerah tersebut. Hampir semua sektor usaha di Kecamatan Kobalima seperti sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan membutuhkan BRI sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat Kobalima, untuk menyalurkan kembali dana kepada masyarakat Kobalima, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Setiap BRI memiliki kebijakan tersendiri dalam penyaluran pembiayaan. Perbankan BRI menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam menyalurkan dana tersebut pastinya diperlukan nasabah yaitu pelaku yang menjalankan usaha yang memerlukan modal untuk usahanya dalam mengembangkan UKM .

Tabel 1.1

Rekap jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) dan anggaran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka pada tahun 2020

No	Jenis Ukm	Jumlah pelaku UKM (Orang)	Anggaran (Rupiah)
1	Kios-kiosan	5	150 Juta
2	Usaha dagang	3	45 Juta
3	Usaha ternak	4	40 Juta
4	Usaha warung	3	30 Juta
5	Kios besar	2	100 Juta
		17	360 Juta

Sumber Bank Bri kec. Kobaliama, Malaka

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah UKM pada BANK BRI Kobalima, sebanyak 19 UKM yang terdiri dari usaha kios-kiosan 5 orang usaha, dengan jumlah anggran 150 Juta Rupiah dengan standar kredit 30 Juta Rupiah kepada pelaku usaha, pada usaha dagang terdiri dari 3 orang usaha, dengan jumlah anggaran 45 Juta Rupiah dengan standar kredit 15 Juta Rupiah pada usaha ternak terdiri dari 4 orang usaha, dengan jumlah anggaran 40 Juta Rupiah dengan standar kredit 10 Juta Rupiah pada usaha warung terdiri dari 3 orang usaha, dengan jumlah anggaran 30 Juta Rupiah dengan standar kredit 10 Juta Rupiah pada usaha kios besar terdiri dari 2 orang usaha. dengan jumlah anggran 100 Juta Rupiah dengan standar kredit 50 Juta Rupiah Dengan jumlah keseluruhan 360 Juta

Berdasarkan data di atas dengan jumlah pelaku UKM ini perlu di kembangkan agar bisa mengoptimalkan usaha pelaku UKM di perekonomian nasional maka dengan adanya lembaga pengkreditan sehingga meningkatkan

permodalan pengusaha UKM.

Hasil wawancara awal dengan salah satu pihak BANK (pak edi) bagian pengkreditan di BANK BRI Kecamatan Kobalima adalah :

program KUR di Kecamatan Kobalima termasuk baik, dengan adanya program KUR pelaku UKM bisa mengembangkan usahanya di perekonomian masyarakat, karena UKM merupakan salah satu penggerak ekonomi nasional yang sangat membutuhkan akses permodalan dengan adanya program KUR para pelaku UKM menjadi mudah untuk memperoleh modal sehingga pada akhirnya dapat membantu mereka dalam menumbuhkembangkan usaha. Karena pentingnya KUR bagi UKM maka pelaksanaannya pun harus dilakukan sebaik mungkin.

Adapun faktor lain yang menghambat pelaksanaan program KUR di kecamatan kobalima yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat UKM yang memanfaatkan program tersebut. Serta ada anggapan dari masyarakat bahwa jika berurusan dengan BANK pasti melibatkan jaminan sementara warga masyarakat banyak yang tidak memiliki jaminan selain usaha yang di jalankan oleh masyarakat UKM.

Isu-isu pada implementasi program penyaluran KUR dalam pengembangan UKM pada PT BANK BRI KECAMATAN KOBALIMA antara lain

1. Suku bunga tinggi
2. Penyaluran belum merata
3. Sosialisasi tidak maksimal
4. Kredit macet

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 'IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA'.

B. Rumusan masalah

Adapun masalah pokok yang hendak dikaji adalah bagaimana implementasi program dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan Kobalima. Dan masalah pokok ini di kaji melalui pertanyaan-pertanyaan berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi program dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan Kobalima?
- 2) Bagaimana organisasi pelaksana dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan Kobalima?
- 3) Bagaimana kelompok sasaran (pemenfaat) dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan Kobalima?

C. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui Implementasi program dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan. Kobalima.
- 2) Untuk mengetahui organisasi pelaksana dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan Kobalima.
- 3) Untuk mengetahui kelompok sasaran (pemenfaat) dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI Kecamatan. Kobalima.

D. Manfaat

Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi penulis dan peneliti lain untuk dijadikan bahan referensi dalam mengkaji berbagai masalah pada implementasi program penyaluran kredit usaha rakyat dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pada BANK BRI kec Kobaliama.

E. Metode penulisan

1) Jenis data

a. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian

b. Data skunder

Yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.

2) Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu seperti telepon, email, atau skype.

3) Teknis analisis data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara yang dikumpulkan dari seluruh sumber.